



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025

08
PUSAT

ONE Team

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN MASYARAKAT TRIWULAN II TAHUN 2025

PENYUSUN



BerAKHLAK
BERAKHLAK
BERAKHLAK
BERAKHLAK

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Tim Penanganan Pengaduan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman kepada Direktur Jenderal DJPT dan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan, selain itu laporan ini disusun untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Periode Triwulan II yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman.

Kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja tim penanganan pengaduan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman.

Jakarta, 30 Juni 2025

Ketua Pokja V

Dikri Cakrawala Uno

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II GAMBARAN UMUM	1
A. Definisi	4
B. Asas - Asas Penanganan Laporan Pengaduan	5
C. Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan.....	6
D. Unsur-Unsur Pengaduan	9
E. Bentuk Pengaduan	9
F. Saluran Pengaduan	10
G. Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat	11
H. Tim Penanganan Pengaduan	11
I. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan.....	12
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN	13
A. Laporan Pengaduan Masyarakat.....	13
B. Perkembangan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Proses Penanganan Pengaduan.....	15
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	17
A. Penilaian/ Perbandingan Rencana Kerja Dengan Pelaksanaan Kegiatan.....	17
B. Permasalahan.....	17
C. Saran Perbaikan.....	18
BAB V TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA	21
A. Saran atau Rekomendasi Sebelumnya.....	21
B. Tindak Lanjut Hasil Monev.....	21
BAB VI PENUTUP	22
BAB VII LAMPIRAN.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik dipilih sebagai cara tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*), dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance* yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Sehingga dianggap memiliki pengaruh besar terhadap aspek-aspek fungsi pemerintah lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan pimpinan. Sehingga tercipta sistem pengawasan silang baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sebagai salah satu unit kerja eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengimplementasikan hal tersebut melalui Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

N O M O R B . 3 3 6 / P P S N Z J / K P . 4 4 0 / I / 2 0 2 4 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Periode Triwulan II adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman kepada Direktorat Jenderal DJPT dan Kepada Inspektorat Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Periode Triwulan II yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada periode Triwulan II 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN- KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN- KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN- KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 68/KEP- DJPT/2019 tentang Peta Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
9. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
10. Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta NOMOR B.336/PPSNZJ/KP.440/I/2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2024

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Definisi

1. Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara KKP yang selanjutnya disebut pegawai adalah PNS, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan Kementerian termasuk pejabat atau pegawai yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada organisasi atau institusi lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengadu adalah masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan KKP.
5. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat dengan nama UPT, adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
6. Teradu adalah pegawai dan/atau masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di

lingkungan Kementerian.

7. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (audit) atau yang bersifat khas.
8. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

B. Asas - Asas Penanganan Laporan Pengaduan

1. Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat;
2. Transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;
3. Koordinasi yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat yang berwenang dan aparaturnya terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
4. Efektivitas dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
5. Akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya;
6. Obyektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi,

golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;

7. Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang;
8. Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

C. Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan

Etika ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur yang menangani laporan penanganan pengaduan masyarakat dalam bersikap, bertindak, berucap, dan berperilaku agar memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan baik intern Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman maupun masyarakat dalam penanganan laporan pengaduan.

❖ Nilai-nilai Dasar Aparatur Pemerintah Yang Menangani Laporan Pengaduan

Aparatur yang menangani pengaduan masyarakat wajib menunjang nilai-nilai dasar, sebagai berikut:

1. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
2. Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur dan bermartabat;
3. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
4. Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan

kapasitas pribadi.

❖ Kewajiban dan Larangan Aparatur Yang Menangani Laporan Pengaduan

1. Aparatur yang menangani laporan pengaduan wajib:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional;
- b. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;
- d. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja;
- e. menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait jabatan, pelaporan, dan terlapor;
- f. menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada atasannya, apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas;
- g. menjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk dokumen kepada pihak lain, yang diperoleh sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas selama menangani pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas.

2. Aparatur yang menangani laporan pengaduan dilarang:

- a. menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk

kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan;

- c. meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun untuk kepentingan proses penanganan pengaduan;
- d. menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun selain pejabat yang diberi kewenangan;
- e. menangani kasus yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

❖ Etika Aparatur Dalam Penanganan Laporan Pengaduan

1. Etika terhadap pelapor meliputi:

- a. memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- c. menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada pelapor;
- e. memberikan penjelasan secara proporsional tentang perkembangan proses pengaduan masyarakat yang ditangani.

2. Etika terhadap terlapor meliputi:

- a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
- b. menghormati hak-hak terlapor.

3. Etika terhadap sesama Aparatur yang menangani laporan pengaduan meliputi:

- a. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan

- unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- b. menggalang rasa kebersamaan;
 - c. menghargai perbedaan pendapat;
 - d. saling membimbing, mengingatkan, dan mengoreksi.

D. Unsur-Unsur Pengaduan

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu:

1. *What*, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
2. *Where*, di mana perbuatan dilakukan;
3. *When*, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
4. *Who*, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
5. *How*, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).

E. Bentuk Pengaduan

Bentuk pengaduan dapat berkaitan dengan dugaan:

1. Penyalahgunaan wewenang;
2. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
3. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman.

F. Saluran Pengaduan

1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Petugas *Help Desk* atau melalui surat yang ditujukan kepada Tim Penanganan Pengaduan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. Jl. Jalan Tuna Raya No.1, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang pelayanan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. Jl. Jalan Tuna Raya No.1, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
3. Melalui Web LAPOR ! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.
4. Melalui media sosial dan elektronik PPS Nizam Zachman Jakarta sebagai berikut :
 - a. Twitter : https://twitter.com/PPSNizam_Jkt
 - b. Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100076200878914>
 - c. Instagram : https://www.instagram.com/ppsnzj_jkt/
 - d. WhatsApp : 0815-1342-7777
 - e. Email : humas.ppsnzj@gmail.com ppsnzj@gmail.com
 - f. Web Site : portal.kkp.go.id

G. Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat

Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat tugas :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat;
2. Menerima pengaduan dan merekomendasikan penanganan kepada Tim Penanganan Pengaduan;
3. Mengumpulkan informasi dan data mengenai kebenaran pengaduan;
4. Mengumpulkan data dan keterangan lain yang relevan dengan Pengaduan;
5. Menilai ancaman dan gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pengadu;
6. Melakukan telaahan/kajian atas pengaduan;
7. Menyusun laporan hasil telaahan/kajian;
8. Menyusun laporan evaluasi penanganan pengaduan setiap bulan;
9. Menyusun laporan monitoring penanganan pengaduan setiap semester.

H. Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

1. Menerima rekomendasi pengaduan dari tim pengelola pengaduan;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna melakukan penanganan pengaduan;
3. Melakukan tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut kepada Tim Pengelola Pengaduan.

I. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

1. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman c.q. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan penanganan pengaduan;
2. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman c.q. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Bidang terkait melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan;
3. Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:
 - a. Pengadu mencabut pengaduan;
 - b. Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi TPP kepada Pengadu;
 - c. Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari TPP dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan.
4. Dalam hal pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan,
pengadu dapat menghubungi UPP c.q. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman.
5. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pengadu, Unit Penanganan Pengaduan (UPP) pada Sekretariat menyelenggarakan sistem pemantauan setiap bulan atas pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN

A. Laporan Pengaduan Masyarakat

Selama periode Triwulan II 2025 Tim Penanganan Pengaduan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman di Jalan Tuna Raya No.1 Jakarta Utara memperoleh pengaduan. Informasi lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1) Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Asal Pelaporan Pengaduan

Jumlah pengaduan masyarakat berdasarkan asal pelaporan pada Periode Triwulan II 2025 yang diperoleh Unit Pengaduan Masyarakat Unit kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman 11 pelaporan. Berikut rincian laporan aduan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**DATA LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN DAN ASAL PENGADUAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN
PERIODE TRIWULAN II 2025**

NO	UNIT KERJA	JENIS PELANGGARAN		ASAL PENGADUAN	
		PELANGGARAN SDKP	MELAKUKAN HAMBATAN DALAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	MASYARAKAT	TIDAK ADA IDENTITAS
1	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	-	-	11	-
JUMLAH		-	-	11	-

Dari gambaran tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah total laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke unit kerja UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sebanyak 11 pengaduan.

Adapun uraian pengaduan berdasarkan asal pelaporan sebagai berikut:

- a. Laporan pengaduan masyarakat yang masuk dan tidak ada identitas (anonim) dari sipelapor nihil;
- b. Laporan pengaduan masyarakat yang berasal dari masyarakat sebanyak 11 pengaduan.

2) Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Saluran Pengaduan

Jumlah pengaduan masyarakat berdasarkan jenis saluran pengaduan pada Periode Triwulan II 2025 yang diperoleh Unit Pengaduan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sebanyak 11 pengaduan. Berikut rincian laporan aduan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

DATA LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN JENIS SALURAN PENGADUAN PERIODE TRIWULAN II 2025

Bulan	Jenis Saluran Pengaduan						Jumlah
	Tatap Muka	Web Lapor	Kotak Pengaduan	Email	Website	Media Sosial	
April	3	-	-	-	-	1	4
Mei	1	-	-	-	-	-	1
Juni	1	-	4	1	-	-	6
Total	5	-	4	1	-	1	11

B. Perkembangan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Proses Penanganan Pengaduan

Jumlah penerimaan pengaduan masyarakat berdasarkan proses penanganan pengaduan pada Periode Triwulan II 2025 yang diterima oleh Unit Pengaduan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman menerima sebanyak 11 laporan. Berikut rincian laporan aduan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

DATA LAPORAN PENGADUAN BERDASARKAN PROSES PENANGANAN PENGADUAN PERIODE TRIWULAN II

NO	UNIT KERJA	PROSES PENANGANAN PENGADUAN					JUMLAH
		SELESAI DITINDAK LANJUTI	BELUM DAPAT DITINDAK LANJUTI	DALAM PROSES ANALISIS	TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI	DISAMPAIKAN KE INSPEKTORAT JENDERAL	
1	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	11	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		11	0	0	0	0	11

Berdasarkan data tersebut terdapat 5 (lima) jenis kategori proses penanganan pengaduan masyarakat, sampai Periode Triwulan II tahun 2025 seluruh laporan pengaduan telah ditindaklanjuti. Proses tindaklanjut terhadap laporan pengaduan yang masuk dan ditujukan kepada unit kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman yakni ditindaklanjuti dengan cara menurunkan tim ke lapangan sebagai bentuk investigasi terhadap pengaduan masyarakat untuk melakukan:

- a. Melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), dan pemeriksaan di lapangan serta berkoordinasi;
- b. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian/ Perbandingan Rencana Kerja Dengan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan rencana kerja program penguatan pengawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman khususnya kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat selama Periode Triwulan II 2025 dapat disampaikan target kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Pengaduan Masyarakat yang telah dilaksanakan pada Periode Triwulan II 2025 berdasarkan rencana kerja yang ada sebagai berikut :

1. Berdasarkan rencana kerja, telah disusun Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta NOMOR B.336/PPSNZJ/KP.440/I/2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2024.
2. Berdasarkan rencana kerja penguatan pengawasan khususnya kegiatan penanganan pengaduan masyarakat selama Periode Triwulan I 2025 adalah melakukan penyusunan laporan hasil monev dan tindak lanjut penanganan pengaduan untuk periode Triwulan IV 2024.

B. Permasalahan

Berdasarkan rencana program kerja penguatan Pengawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Tahun 2025 pada Periode Triwulan II adalah terdapat 11 (sebelas) permasalahan, sebagai berikut :

1. Pelapor beridentitas Devi Ana Br Sinaga dengan pengaduan konsultasi persyaratan AKP (Awak Kapal

Perikanan)

2. Pelapor beridentitas Casyoto dengan pengaduan pengambilan sertifikat BST
3. Pelapor dari PT. Starmarindo dengan pengaduan pengajuan mengenai pedagang kaki lima di samping perusahaan untuk ditertibkan sampahnya
4. Pelapor beridentitas Sugeng dengan pengaduan pengambilan sertifikat BST
5. Pelapor beridentitas Muhammad Zuhaimi Al Mustofa dengan pengaduan konsultasi penelitian PKL
6. Pelapor dari PT. Sepakat Tjipta Hasil Cemerlang dengan pengaduan kartu pas masuk tidak bisa digunakan di loket pintu masuk motor
7. Pelapor dari Warung Mie Ayam Wonogiri dengan pengaduan jenis kartu brizzi tidak bisa digunakan pas masuk loket kendaraan bermotor
8. Pelapor dari PT. Citra Dimensj Arthali dengan pengaduan saluran pembuangan air yang tertutup di area samping belakang PT. CEDEA
9. Pelapor dari PT. Lautan Bahari Sejahtera dengan pengaduan kartu tidak dapat digunaka dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni
10. Pelapor dari PT. Intimas Surya dengan pengaduan kartu rusak tidak bisa digunakan
11. Pelapor beridentitas Syamsur dengan pengaduan konsultasi pencarian anggota keluarga.

C. Saran Perbaikan

Periode Triwulan II ada 5 formulir pengaduan yang belum diupload oleh petugas di aplikasi LAPOR.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

A. Saran atau Rekomendasi Sebelumnya

Formulir pengaduan masyarakat diharapkan untuk di upload aplikasi LAPOR secara berkala.

B. Tindak Lanjut Hasil Monev

Melakukan upload formulir pengaduan masyarakat periode Triwulan I di aplikasi LAPOR .

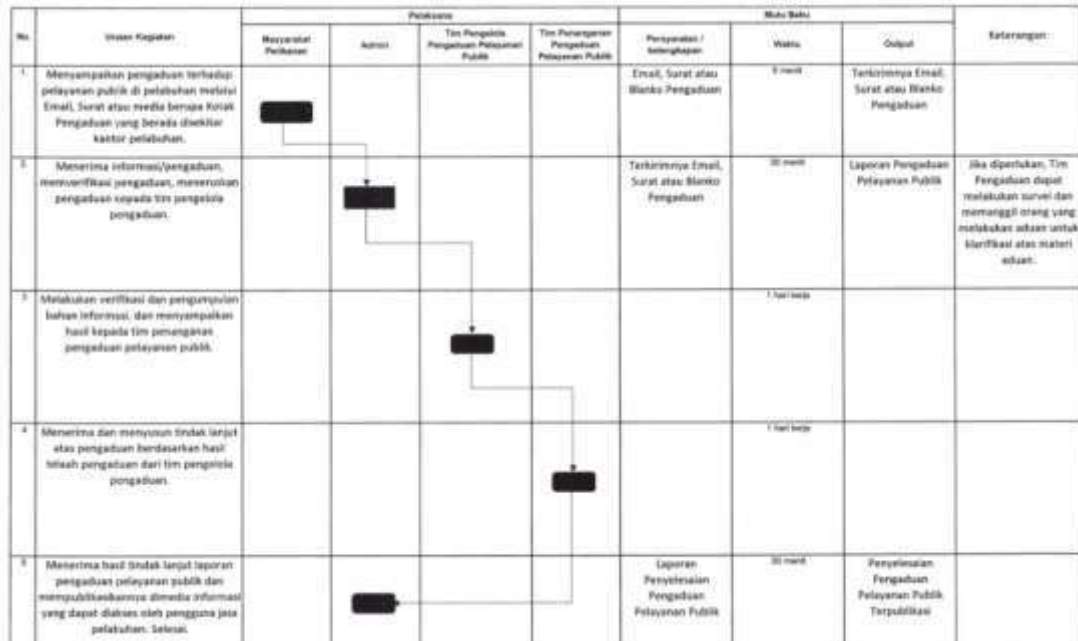
BAB VI

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan Pangkalan Tim Penanganan Pengaduan yang akan datang.

LAMPIRAN

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	PFSNZI_005
	Tgl. Pembuatan	11 Juli 2016
	Tgl. Revisi	01 Oktober 2021
	Tgl. Efektif	01 November 2021
	Disahkan Oleh	 Kepala Pelabuhan
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA KELOMPOK TATA USAHA		NAMA SOP PENGELAAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK LINGKUP PELABUHAN
Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 98/MEN/2012 tentang Kapelabuhan Perikanan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor : 68/KEP-DIPT/2019 tentang Peta Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap		Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami ketentuan tentang penanganan pengaduan pelayanan publik di lingkungan pelabuhan perikanan
Keterkaitan 1. SOP Laporan SIMAS BMN 2. SOP Surat Masuk 3. SOP Surat Keluar		Peralatan/Perlengkapan 1. PC 2. ATK 3. Dokumen 4. Dokumen Pendukung lainnya
Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan, dapat menghambat penanganan pengaduan pelayanan publik di pelabuhan perikanan.		Pencatatan dan Pendataan 1. Dokumen Pelayanan Publik





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA
JALAN TUNA RAYA NO.1 MUARA BANGSUNG PERJARINGAN JAKARTA UTARA 14448
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868
E-MAIL keppa@kcp.go.id, survei@kcp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B.336/PPSNZ.I/KP.440/I/2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Tim Pengelolaan Dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* dengan Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Dasar : 1. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 No.75 Tambahan Nomor 3861);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan

2

Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

- Kepada : Daftar Nama Terlampir
- Untuk : a. Membentuk Tim Pengelolaan Dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025;
- b. Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* mempunyai tugas:
1. Menyiapkan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System*;
 2. Menerima pengaduan dan merekomendasikan penanganan kepada Tim Penanganan Pengaduan;
 3. Mengumpulkan informasi dan data mengenai kebenaran pengaduan;
 4. Mengumpulkan data dan keterangan lain yang relevan dengan Pengaduan;
 5. Menilai ancaman dan gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pengadu;
 6. Melakukan telaahan/kajian atas pengaduan;
 7. Menyusun laporan hasil telaahan/kajian;
 8. Menyusun laporan evaluasi penanganan pengaduan setiap bulan;
 9. Menyusun laporan monitoring penanganan pengaduan setiap semester.
- c. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas:
1. Menerima rekomendasi pengaduan dari Tim Pengelola Pengaduan;

2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna melakukan penanganan pengaduan;
 3. Melakukan tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut kepada Tim Pengelola Pengaduan.
- d. Tim Penanganan Pengaduan mengelola pengaduan melalui:
1. Pengaduan disampaikan langsung kepada Petugas Help Desk atau melalui surat yang ditujukan kepada Tim Penanganan Pengaduan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jl. Jalan Tuna Raya No.1, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
 2. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memisukannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang pelayanan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jl. Jalan Tuna Raya No.1, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
 3. Melalui Web LAPOR ! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.
 4. Melalui media sosial dan elektronik PPS Nizam Zachman Jakarta sebagai berikut :
- | | |
|-----------|---|
| Twitter | www.twitter.com/humas_ppsnp2 |
| Facebook | www.facebook.com/ppsnp2?fbclid=IwAR10007620087891 |
| Instagram | www.instagram.com/ppsnp2 |
| WhatsApp | 0815-1342-7777 |
| E-mail | humas_ppsnp2@ppsn2.com |
| Website | www.kkp.go.id/ppsnp2 |

- e. Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 36/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dalam melaksanakan tugas dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pelabuhan.

Demikian surat tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 22 Januari 2025

Tersisa ruang untuk tidak memberikan
tanda-tanda, atau yang dapat
menghasilkan KAS, grafik, dan
lainnya yang penting.

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera
Nizam Zachman Jakarta,

[Signature]
Asesmanepublik

Lampiran Surat Tugas

Nomor : B.336/PPSNZJ/KP.440/I/2024

Tanggal : 22 Januari 2025

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM PADA PELABUHAN
PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat			
	Asep Saepulloh	Kepala Pelabuhan	Penanggung Jawab
	Doddy Imantyo	P3T Madya	Ketua
	Lazuardi	P3T Muda	Wakil Ketua
	Koko Nuripta Weddyanto	Pranata Humas Pelaksana	Sekretaris
	Lia Anggia Murni	APK APBN Madya	Anggota
	Dwiharto Kurniawan	P3T Madya	Anggota
	Diki Indra Perdana	P3T Muda	Anggota
	Nova Santosa	Kepala Subbagian Umum	Anggota
	Nur Alimin	P3T Muda	Anggota
	Hardianty	Pranata Humas Pelaksana	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
II. Tim Publikasi Whistle Blowing System			
	Hardianty	Pranata Humas Terampil	Anggota
	M Roys Birrul M	Pranata Humas Pertama	Anggota
	Egi Yogaswara	Pranata Humas Pertama	Anggota
	Koko Nuripta W	Pranata Humas Terampil	Anggota

Jakarta, 22 Januari 2025

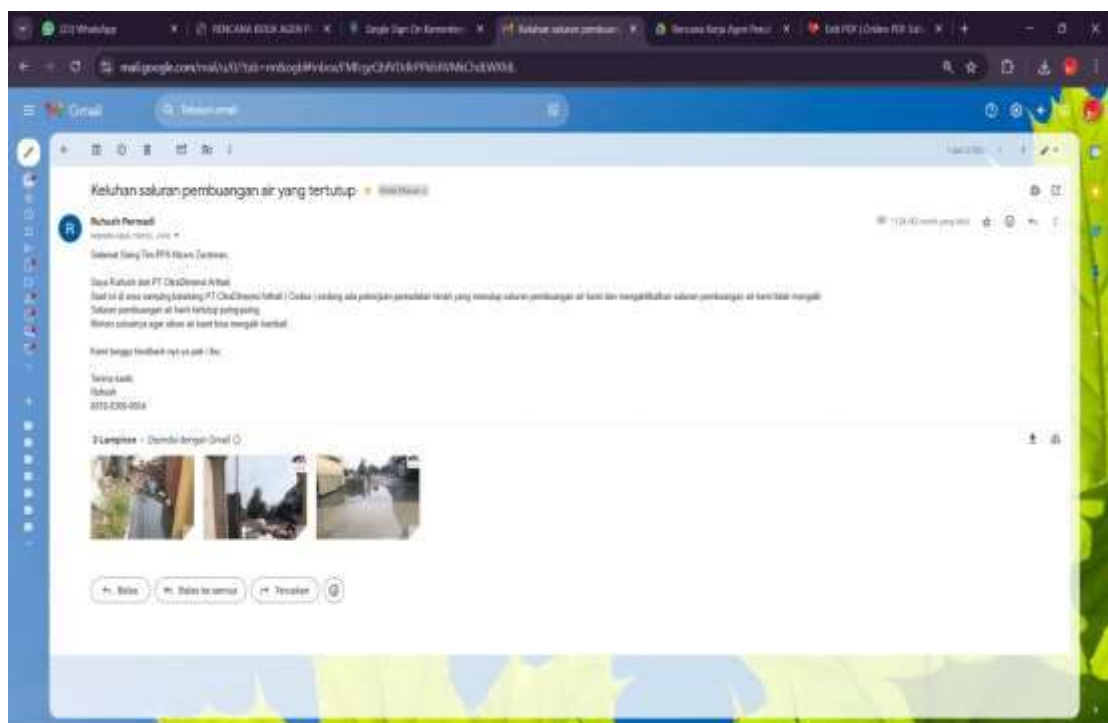
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera

Nizam Zachman Jakarta,

Terima kasih untuk tidak memberikan
sesuatu atau janji yang dapat
mengakibatkan KKN, gratifikasi dan
benturan kepentingan.



Asep Saepulloh





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Jl. Tuna Raya No. 1, Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868,
LAMAM <http://www.kkp.go.id/djpt/ppsanzj>, GMAIL : ppsanzj@gmail.com

FORM PENGADUAN

Nama Perusahaan	: PT. INTIMAS SURYA
Alamat	: JL. MUARA BARU UJUNG BLOK E NO.1
Nomor Tlp	: 085210322749
Tanggal	: 10/06/2025
Tanda Tangan	: YUNI
Uraian Keluhan	: KARTU RUSAK TIDAK BISA DITAP KARTU TAP CASH NO 7546 0000 3126 3938 ATAS NAMA : EMI
Usulan dari Pelapor	: LEBIH BAIK GANTI STIKER
Pengecekan Petugas	:
Nama Petugas	: RIRIN
Tanggal	: 10 JUNI 2025
Tanda Tangan	: 
Tindak Lanjut	: KARTU RUSAK AGAR GANTI KARTU

Mengetahui,

Petugas Pengaduan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Jl. Tuna Raya No. 1, Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868,
LAMAM <http://www.kkp.go.id/djpt/ppsnpj>, GMAIL : ppsnzj@gmail.com

FORM PENGADUAN

Nama Perusahaan	: PT. LAUTAN BAHARI SEJAHTERA
Alamat	: BLOK J NO. 7
Nomor Tlp	: 021-6623526
Tanggal	: 5 Juni 2025
Tanda Tangan	:
Uraian Keluhan	: kartu tidak dapat digunakan dr bulan Mei sampai Juni No. kartu tap cash 7546 0000 3063 4691
Usulan dari Pelapor	: mohon dipastikan lagi semua kartu yg kami bayar sudah di registrasi kembali setiap bulannya
Pengecekan Petugas	:
Nama Petugas	: RIRIN
Tanggal	: 5 JUNI 2025
Tanda Tangan	: 
Tindak Lanjut	: KARTU RUSAK AGAR GANTI KARTU BARU DAN REGISTRASI ULANG

Mengetahui,
Petugas Pengaduan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Jl. Tuna Raya No. 1, Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868,
LAMAM <http://www.kkp.go.id/djpt/ppsanzj>, GMAIL : ppsanzj@gmail.com

FORM PENGADUAN

Nama Perusahaan	: PT.Sepakat Tjipta Hasil Cemerlang/Apong
Alamat	: jl.muara baru ujung, dermaga barat, transit 09
Nomor Tlp	: 081285808150
Tanggal	: 2 – Juni - 22025
Tanda Tangan	:
Uraian Keluhan	: kartu tidak bisa tab/buka palang pintu diloket masuk pelabuhan Nizam Zachman Jakarta Apong : Tap cash: 7546-0000-3089-3156 : gol.I, Motor : D 3131 PO
Usulan dari Pelapor	: minta tolong kartu diregristasi ulang dan diaktifkan kembali supaya bisa buat buka palang pintu loket masuk PPS Nizam Zachman Jakarta
Pengecekan Petugas	:
Nama Petugas	: RIRIN
Tanggal	: 2 Juni 2025
Tanda Tangan	: 
Tindak Lanjut	: REGISTRASI ULANG

Mengetahui,

Petugas Pengaduan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Jl. Tuna Raya No. 1, Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868,
LAMAM <http://www.kkp.go.id/djpt/ppsanzj>, GMAIL : ppsanzj@gmail.com

FORM PENGADUAN

Nama Perusahaan	: Warung Mie Ayam Wonogiri
Alamat	: Jln Muara Baru Ujung Dermaga timur transit 11 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Dzachman, Penjaringan, Jakarta Utara
Nomor Tlp	: 085692888911
Tanggal	: 02 Juni 2025
Tanda Tangan	:
Uraian Keluhan	: Kartu pas masuk dengan keterangan sebagai berikut: Atas nama 1. Eka Sulistyowati Jenis kartu Brizzi (6013 5002 0062 2331) Nopol B 3811 UTO 2. Wigit Gunawan Jenis kartu Brizzi (6013 5002 0062 4162) Nopol B 3757 UUO 3. Munadi Jenis kartu Brizzi (6013 5002 0062 4196) Nopol B 3841 TYB 4. Daryanti Jenis kartu Brizzi (6013 5002 0062 4170) Nopol AD 4253 AKG Tidak dapat digunakan
Usulan dari Pelapor	: Mohon dibantu pengecekan kartu diatas, dikarenakan tidak dapat digunakan sebagaimana-mestinya
Pengecekan Petugas	:
Nama Petugas	: RIRIN
Tanggal	: 2 JUNI 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Jl. Tuna Raya No. 1, Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868,
LAMAR <http://www.kkp.go.id/djpt/ppsanzj>, GMAIL : ppsanzj@gmail.com

FORM PENGADUAN

Nama Perusahaan	:	Deviana Br Sinaga
Alamat	:	Jl Tangki wood III/10 taman sari jakbar
Nomor Tlp	:	-
Tanggal	:	16/4/2025
Tanda Tangan	:	
Uraian Keluhan	:	
Usulan dari Pelapor	:	Konsultasi Perijinan AEP (awak kapal perikanan)
Pengecekan Petugas	:	
Nama Petugas	:	
Tanggal	:	
Tanda Tangan	:	
Tindak Lanjut	:	

Mengetahui,
Petugas Pengaduan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Jl. Tuna Raya No. 1, Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868,
LAMAM <http://www.kkp.go.id/djpt/ppsnzj>, GMAIL : ppsnzj@gmail.com

FORM PENGADUAN

Nama Perusahaan	:	Caryoto
Alamat	:	wono kerta kulon, petalangan
Nomor Tlp	:	
Tanggal	:	21/11/2025
Tanda Tangan	:	
Uraian Keluhan	:	
Usulan dari Pelapor	:	pengambilan sertifikat BST
Pengecekan Petugas	:	
Nama Petugas	:	
Tanggal	:	
Tanda Tangan	:	
Tindak Lanjut	:	

Mengetahui,
Petugas Pengaduan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Jl. Tuna Raya No. 1, Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868,
LAMAM <http://www.kkp.go.id/djpt/ppsnzj>, GMAIL : ppsnzj@gmail.com

FORM PENGADUAN

Nama Perusahaan	:	Sugeng
Alamat	:	Jatimulya, Tegal
Nomor Tlp	:	
Tanggal	:	30/4/2025
Tanda Tangan	:	
Uraian Keluhan	:	
Usulan dari Pelapor	:	Pengambilan Sertifikat BST
Pengecekan Petugas	:	
Nama Petugas	:	
Tanggal	:	
Tanda Tangan	:	
Tindak Lanjut	:	

Mengetahui,
Petugas Pengaduan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Jl. Tuna Raya No. 1, Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868,
LAMAM <http://www.kkp.go.id/djpt/ppsnpj>, GMAIL : ppsnpj@gmail.com

FORM PENGADUAN

Nama Perusahaan	:	M-Zuhaimi
Alamat	:	Undip (Mahasiswa)
Nomor Tlp	:	
Tanggal	:	19/5/2025
Tanda Tangan	:	
Uraian Keluhan	:	
Usulan dari Pelapor	:	Konsultasi Penelitian
Pengecekan Petugas	:	
Nama Petugas	:	
Tanggal	:	
Tanda Tangan	:	
Tindak Lanjut	:	

Mengetahui,
Petugas Pengaduan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Jl. Tuna Raya No. 1, Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868,
LAMAM <http://www.kkp.go.id/djpt/ppsanzj>, GMAIL : ppsanzj@gmail.com

FORM PENGADUAN

Nama Perusahaan	:	Syamsur
Alamat	:	Korong Tobon, Kandang Gadang, Panaman
Nomor Tlp	:	
Tanggal	:	20/6/2025
Tanda Tangan	:	
Uraian Keluhan	:	Konsultasi Pencarian anggota keluarga
Usulan dari Pelapor	:	
Pengecekan Petugas	:	
Nama Petugas	:	
Tanggal	:	
Tanda Tangan	:	
Tindak Lanjut	:	

Mengetahui,
Petugas Pengaduan